

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Defisit Rp 26 Miliar, Garut Lakukan Efisiensi
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Garut
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal.6
Edisi	: Selasa, 7 Agustus 2018

Defisit Rp 26 Miliar, Garut Lakukan Efisiensi

GARUT, (PR).-

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 Pemerintah Kabupaten Garut mengalami defisit Rp 26 miliar karena pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi aparatur sipil negara. Defisit tersebut membuat Pemkab Garut melakukan efisiensi belanja satuan kerja perangkat daerah.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Uu Sae-pudin mengatakan, pembayaran gaji ke-13 dan TKD yang masuk komponen tunjangan hari raya, tidak dianggarkan dalam APBD 2018 karena diberlakukan mendadak oleh pemerintah pusat. Untuk membayar dua kewajiban itu

pada Juli 2018, Pemkab Garut mengambil jatah pos belanja lain dalam APBD murni 2018. Oleh karena itu, pada APBD Perubahan 2018, pos belanja yang dipakai untuk membayar gaji ke-13 dan TKD harus diganti.

Pemkab Garut tadinya berharap, pemerintah pusat menambah dana alokasi umum. Namun, hingga kini tidak ada penambahan DAU karena pemerintah pusat belum melakukan perubahan APBN 2018.

Pemkab Garut pun memutar

otak untuk menutupi anggaran pembayaran gaji ke-13 dan TKD dalam komponen THR. Salah satu yang akan dilakukan yakni menyiasati harga proyek agar lebih murah.

"Beberapa efisiensi pelelangan. Ada kegiatan yang diefisienkan, misalnya harga normalnya Rp 100 miliar, ditawarkan jadi Rp 80 miliar," ucap Uu di Setda Kabupaten Garut, Senin (6/8/-2018).

"Sebenarnya kami ini setiap bulan pas, tetapi karena digunakan untuk gaji ke-13 dan TKD, jadi berkurang Rp 26 miliar," ucap Rudy di gedung DPRD Garut.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu SKPD yang terdampak penghematan belanja dalam APBD 2018.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Garut Wahyudijaya menuturkan, pihaknya mengurangi frekuensi sosialisasi karena efisiensi anggaran. Intensitas pengawasan dini terkait nasionalisme juga akan dilonggarkan.

Menurut Wahyu, efisiensi anggaran harus dilakukan karena pengeluaran gaji ke-13 dan TKD bagi PNS adalah instruksi dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan pemerintah daerah. **(Rani Umami Fadila)*****

”
*Sebenarnya setiap
bulan pas, tetapi
karena digunakan
untuk gaji ke-13 dan
TKD, jadi berkurang
Rp. 26 miliar.*

”
**Bupati Garut
Rudy Gunawan**